



JURNAL MUDABBIR

(Journal Research and Education Studies)

Volume 5 Nomor 2 Tahun 2025

<http://jurnal.permapendis-sumut.org/index.php/mudabbir>



ISSN: 2774-8391

Relasi Komensalisme Antar Etnik: Studi Interaksi Ekonomi Pedagang Tionghoa dan Warga Lokal di Helvetia, Medan

Nuriza Dora¹, Skar Kemuning², Adelia Harahap³

^{1,2,3} Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, Indonesia

Email: nurizadora@uinsu.ac.id, skarkemuning29@gmail.com,
sayaadelia100@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji pola hubungan sosial-ekonomi antara pedagang Tionghoa dan masyarakat lokal multietnis di Kelurahan Helvetia, Medan, dalam bingkai konsep komensalisme. Dengan pendekatan kualitatif dan metode studi kasus, data diperoleh melalui wawancara mendalam terhadap delapan informan kunci dari berbagai latar belakang etnis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa relasi antar kelompok berlangsung dalam suasana damai dan fungsional, namun bersifat asimetris. Pedagang Tionghoa memperoleh keuntungan ekonomi signifikan melalui dominasi sektor perdagangan, sementara masyarakat lokal umumnya hanya berperan sebagai konsumen tetap atau pekerja informal tanpa akses yang setara terhadap sumber daya ekonomi. Interaksi sosial yang terbangun cenderung simbolik dan tidak berkembang menjadi kerja sama kultural atau ekonomi yang inklusif. Relasi komensalisme ini bertahan karena kebutuhan timbal balik dan sikap toleransi, tetapi menyimpan ketimpangan struktural yang dapat memperkuat stratifikasi sosial berbasis etnis. Oleh karena itu, perlu adanya intervensi kolaboratif melalui pelatihan usaha, akses modal, dan kemitraan ekonomi lintas etnis untuk mendorong transformasi menuju hubungan yang lebih adil dan saling menguntungkan.

Kata Kunci: Etnis Tionghoa, Interaksi Ekonomi, Ketimpangan Struktural, Komensalisme, Masyarakat Lokal.

ABSTRACT

This research examines the socio-economic relationship between Chinese traders and the multiethnic local community in Helvetia, Medan, through the lens of commensalism. Employing a qualitative approach with a case study method, data were collected through in-depth interviews with eight key informants from various ethnic backgrounds. The findings reveal that the interethnic relations are peaceful and functional, yet structurally asymmetrical. Chinese traders dominate the local trade sector and gain significant economic benefits, while residents mainly

from Batak, Malay, Javanese, Acehnese, Minangkabau, and Nias ethnic groups – generally serve as loyal consumers or informal workers, with limited access to economic resources. The social interactions remain symbolic and do not develop into deeper cultural or economic collaborations. This commensal relationship persists due to mutual practical needs and interethnic tolerance but conceals underlying structural inequalities that may reinforce ethnic-based social stratification. Therefore, collaborative interventions such as entrepreneurship training, access to capital, and cross-ethnic business partnerships are needed to transform this one-sided commensalism into a more equitable and mutually beneficial relationship.

Keywords: Chinese Ethnicity, Economic Interaction, Structural Inequality, Commensalism, Local Community.

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara multietnis yang memiliki lebih dari 1.300 kelompok etnis yang tersebar di berbagai wilayah. Keberagaman ini menjadi ciri khas bangsa, namun juga menciptakan dinamika sosial yang kompleks, terutama di wilayah perkotaan yang menjadi titik temu berbagai budaya. Kota Medan adalah salah satu kota besar di Sumatera Utara yang menjadi ruang hidup bersama bagi etnis Batak, Melayu, Jawa, Tionghoa, Minangkabau, Aceh, dan Nias. Keberagaman ini tidak hanya terlihat dalam ranah budaya dan adat istiadat, tetapi juga dalam pola akses terhadap kekuasaan ekonomi dan sumber daya sosial lainnya (Koentjaraningrat, 2009; Soemardjan & Soemardi, 2004).

Di Kelurahan Helvetia, Medan, terdapat interaksi sosial-ekonomi yang cukup khas antara pedagang Tionghoa dan masyarakat lokal dari berbagai suku. Pedagang Tionghoa mendominasi sektor perdagangan dalam skala besar – menjual sembako, alat bangunan, plastik, dan kebutuhan rumah tangga – sementara masyarakat lokal pada umumnya berperan sebagai konsumen atau pekerja informal. Dalam konteks ini, muncul pola relasi yang menyerupai komensalisme, yaitu ketika satu pihak (pedagang Tionghoa) memperoleh manfaat ekonomi secara signifikan, sementara pihak lain tidak mendapatkan keuntungan serupa, meskipun tidak dirugikan secara langsung.

Relasi komensalisme ini bersifat fungsional dan cenderung damai, tetapi menyimpan ketimpangan struktural yang tidak tampak secara kasat mata. Warga lokal dari berbagai etnis mengakui bahwa mereka sangat bergantung pada toko-toko milik Tionghoa, baik untuk kebutuhan rumah tangga maupun usaha kecil. Namun, keterlibatan mereka dalam skema ekonomi tersebut hanya sebatas sebagai pelanggan tetap atau tenaga kerja tidak tetap. Sementara itu, keterlibatan sosial pedagang

Tionghoa dalam kegiatan adat dan keagamaan warga lokal juga terbatas, meskipun mereka sesekali berkontribusi dalam bentuk sumbangan atau donasi simbolik (Mujani, 2017; Simamora, 2022).

Kondisi ini menimbulkan pertanyaan kritis mengenai keberlanjutan hubungan antar etnis yang berlangsung secara netral namun timpang. Apakah relasi komensalisme ini cukup adil untuk terus dipertahankan? Apakah masyarakat lokal memiliki peluang yang sama untuk berkembang secara ekonomi dalam ruang yang sama? Dalam konteks masyarakat multikultural perkotaan, relasi sosial yang harmonis sering kali menyembunyikan ketimpangan yang tidak disadari secara eksplisit oleh masyarakat itu sendiri.

Konsep komensalisme ekonomi menawarkan sudut pandang baru dalam memahami hubungan antaretnis yang tidak semata-mata didasarkan pada konflik atau integrasi total. Ia memperlihatkan kemungkinan adanya hubungan fungsional dan saling menguntungkan meskipun tanpa kesetaraan penuh dalam akses terhadap sumber daya. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji secara mendalam bagaimana dinamika komensalisme ekonomi ini berlangsung, apa saja faktor yang memperkuat atau melemahkannya, serta bagaimana persepsi kedua belah pihak terhadap relasi yang terbentuk. Untuk memahami dunia, nilai-nilai dan perilaku orang lain kita harus memahami kerangka persepsinya. Dalam berkomunikasi antarbudaya yang ideal kita berharap banyak persamaan dalam pengalaman dan persepsi budaya. Tetapi karakter budaya berkecenderungan memperkenalkan kita kepada pengalaman-pengalaman yang tidak sama atau berbeda. Oleh sebab itu ia membawa persepsi budaya yang berbeda-beda pada dunia di luar budaya sendiri (M. Iqbal, 2024).

Berdasarkan pertimbangan tersebut, penelitian ini penting dilakukan untuk menggali lebih dalam bagaimana pola relasi komensalisme terbentuk, dijalankan, dan dimaknai oleh masing-masing pihak. Dengan fokus pada relasi ekonomi dan sosial antara pedagang Tionghoa dan masyarakat lokal Helvetia, studi ini diharapkan mampu memberikan gambaran yang lebih utuh tentang relasi antar etnik dalam konteks masyarakat urban multikultural, serta membuka diskusi tentang pentingnya relasi ekonomi yang lebih setara dan saling menguntungkan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus untuk memahami secara mendalam hubungan komensalisme antara pedagang Tionghoa dan masyarakat lokal di wilayah Helvetia, Medan. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan delapan informan kunci yang terdiri dari seorang pedagang Tionghoa, kepala lingkungan, dan enam warga lokal dari berbagai etnis (Melayu, Batak, Jawa, Aceh, Minangkabau, dan Nias) yang dipilih secara purposif. Wawancara dilakukan dengan panduan semi-terstruktur untuk menggali pola interaksi ekonomi, keterlibatan sosial, serta persepsi terhadap relasi etnik yang terjadi. Data dianalisis secara tematik dengan langkah reduksi data, kategorisasi tema, dan interpretasi makna berdasarkan konsep komensalisme. Keabsahan data diperkuat melalui triangulasi sumber dan konfirmasi ulang kepada informan (*member checking*) (Assingkily, 2021), guna memastikan akurasi informasi yang diperoleh.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dari hasil wawancara dan observasi yang peneliti lakukan di lapangan, terlihat bahwa interaksi sosial antara pedagang Tionghoa dan masyarakat lokal di Kelurahan Helvetia berjalan dalam suasana yang relatif harmonis dan damai tanpa memunculkan gesekan atau konflik antaretnis. Narasumber dari berbagai latar belakang etnis seperti Batak, Melayu, Jawa, Minangkabau, Aceh, dan Nias menyatakan bahwa mereka merasa nyaman dalam berinteraksi dengan pedagang Tionghoa, terutama dalam konteks transaksi ekonomi. Hal ini menunjukkan bahwa keberagaman etnis yang ada tidak menjadi penghalang dalam menjalin relasi sosial sehari-hari. Justru, keberadaan pedagang Tionghoa yang telah lama menetap di kawasan tersebut diterima sebagai bagian dari kehidupan masyarakat Helvetia. Masyarakat tidak melihat perbedaan etnis sebagai ancaman, melainkan sebagai bagian dari realitas sosial yang telah berlangsung lama. Meskipun hubungan yang terbentuk bersifat fungsional dan cenderung terbatas pada aktivitas ekonomi, tidak ditemukan adanya sikap diskriminatif, penolakan, atau konflik terbuka di antara mereka. Hal ini membuktikan bahwa masyarakat multietnis

di wilayah Helvetia mampu hidup berdampingan secara sosial dalam suasana yang kondusif, meskipun belum sepenuhnya membangun relasi yang setara secara ekonomi.

Pedagang Tionghoa di Helvetia diketahui menguasai pasar lokal melalui jaringan toko grosir dan eceran yang menjual sembako, plastik, alat rumah tangga, serta bahan bangunan. Mereka memiliki keunggulan modal, pengalaman dagang lintas generasi, dan hubungan dengan distributor besar yang membuat harga barang relatif lebih murah dan lengkap dibanding toko milik warga lokal. Toko-toko ini menjadi rujukan utama bagi hampir semua kelompok etnis dalam memenuhi kebutuhan harian maupun stok usaha kecil. Hal ini dikonfirmasi oleh pernyataan informan dari pihak Tionghoa, "Barang kami lengkap dan harga masuk akal. Pelanggan kami dari Melayu, Batak, Jawa, India." Dominasi ini menjadikan pedagang Tionghoa sebagai kelompok yang memperoleh keuntungan ekonomi paling besar dan berperan sebagai pusat distribusi komoditas lokal.

Pedagang Tionghoa di Helvetia diketahui menguasai pasar lokal melalui jaringan toko grosir dan eceran yang menjual sembako, plastik, alat rumah tangga, serta bahan bangunan. Mereka memiliki keunggulan modal, pengalaman dagang lintas generasi, dan hubungan dengan distributor besar yang membuat harga barang relatif lebih murah dan lengkap dibanding toko milik warga lokal. Toko-toko ini menjadi rujukan utama bagi hampir semua kelompok etnis dalam memenuhi kebutuhan harian maupun stok usaha kecil. Hal ini dikonfirmasi oleh pernyataan informan dari pihak Tionghoa, "Barang kami lengkap dan harga masuk akal. Pelanggan kami dari Melayu, Batak, Jawa, India." Dominasi ini menjadikan pedagang Tionghoa sebagai kelompok yang memperoleh keuntungan ekonomi paling besar dan berperan sebagai pusat distribusi komoditas lokal.

Sebaliknya, masyarakat lokal tidak memiliki posisi yang sejajar dalam struktur ekonomi tersebut. Mereka umumnya hanya bertindak sebagai konsumen setia dari toko-toko Tionghoa, atau dalam kasus tertentu, menjadi pekerja informal seperti supir angkut, kuli bongkar, dan penjaga toko. Ada pula warga lokal yang mencoba berdagang kecil-kecilan, namun mereka tetap bergantung pada toko Tionghoa sebagai pemasok barang dagangan. Ketimpangan akses terhadap modal, jaringan, dan pengetahuan bisnis menyebabkan masyarakat lokal tidak mampu bersaing dalam skala yang lebih besar. Hal ini sebagaimana dikatakan oleh informan dari suku Aceh, "Kami

tidak dirugikan, tapi juga tidak ikut untung. Hubungan satu arah.” Dengan kata lain, relasi ekonomi ini menciptakan ketergantungan satu arah yang menguntungkan hanya salah satu pihak.

Hubungan sosial yang terbangun antara kedua kelompok juga memperlihatkan pola yang netral dan simbolik. Meskipun tidak terjadi konflik, interaksi sosial tidak berkembang menjadi relasi kultural yang lebih dalam. Pedagang Tionghoa jarang terlibat dalam kegiatan sosial masyarakat lokal, kecuali dalam bentuk sumbangan atau partisipasi simbolik jika diminta secara khusus. Misalnya, mereka akan menyumbang dana atau air mineral saat ada kegiatan kampung, namun tidak ikut dalam acara adat, gotong royong, atau perayaan keagamaan warga. Informan dari suku Melayu menyampaikan, “Mereka ikut sumbangan kalau ada 17-an, tapi kalau kegiatan adat atau agama, mereka jarang.” Hal ini menunjukkan bahwa relasi sosial bersifat fungsional dan tidak menjangkau dimensi integratif budaya.

Lebih jauh, tidak ditemukan bentuk kolaborasi ekonomi yang setara antara pedagang Tionghoa dan masyarakat lokal. Tidak ada program pelatihan, pendampingan usaha, atau bentuk kemitraan yang memungkinkan warga lokal berkembang sebagai mitra sejajar dalam usaha. Hubungan tetap bersifat vertikal, di mana pedagang Tionghoa bertindak sebagai pemasok utama, sementara warga lokal sebagai pengguna barang atau tenaga kerja. Informan dari suku Batak mengungkapkan keinginannya, “Kalau bisa, ada pelatihan atau usaha bareng. Jangan cuma kita beli terus.” Sayangnya, belum ada inisiatif kolaboratif lintas etnis yang terbangun secara institusional maupun kultural.

Relasi komensalisme ini memang memberikan keuntungan praktis bagi masyarakat lokal berupa akses terhadap barang murah dan mudah dijangkau. Namun, manfaat tersebut hanya bersifat konsumtif, tanpa disertai peluang peningkatan kesejahteraan. Dengan kata lain, relasi ini fungsional untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, tetapi tidak mengarah pada pemberdayaan ekonomi. Warga tetap berada dalam posisi subordinat dan tidak memiliki ruang untuk mobilitas sosial melalui aktivitas ekonomi yang produktif. Seorang informan dari suku Nias menyatakan, “Saya rasa netral. Tidak bermasalah, tapi juga tidak dekat. Kami hanya beli barang, bukan partner.”

Keberlangsungan pola komensalisme ini dimungkinkan karena masyarakat lokal menerima relasi tersebut sebagai sesuatu yang “sudah dari dulu begitu”. Mereka menyadari adanya ketimpangan, namun tidak merasa memiliki daya atau dukungan untuk mengubah struktur yang ada. Sebagian besar informan mengekspresikan sikap pasrah, yang mencerminkan bentuk kesadaran sosial yang teredam. Informan dari suku Minangkabau menyebutkan, “Kalau istilahnya komensalisme, mungkin iya. Kami tidak dirugikan, tapi juga tidak dapat untung.” Ini menunjukkan bahwa ketimpangan dalam relasi antaretnis ini berlangsung bukan karena konflik, tetapi karena tidak adanya kesadaran kritis dan akses terhadap sumber daya yang adil.

Fenomena ini memperlihatkan bagaimana stabilitas sosial yang tampak di permukaan bisa menyembunyikan ketimpangan struktural yang mendalam. Ketika masyarakat lokal tidak memiliki akses ke modal, pelatihan usaha, atau dukungan jaringan dagang, maka relasi komensalisme cenderung melanggengkan posisi dominan satu kelompok dan posisi pasif kelompok lain. Jika tidak diantisipasi dengan kebijakan pemberdayaan yang tepat, maka relasi seperti ini berisiko memperkuat stratifikasi sosial berdasarkan etnis dalam jangka panjang. Meskipun damai, hubungan semacam ini tidak menjamin keadilan ekonomi antaretnis yang setara.

Dalam konteks masyarakat multikultural perkotaan seperti Medan, penting untuk mengembangkan relasi antaretnis yang tidak hanya toleran secara sosial, tetapi juga inklusif secara ekonomi. Pemerintah, tokoh masyarakat, dan pelaku usaha lintas etnis perlu mendorong program kolaboratif seperti koperasi bersama, pelatihan kewirausahaan, dan sistem kemitraan usaha antara pedagang besar dan pelaku UMKM lokal. Dengan menciptakan ruang interaksi yang produktif dan adil, relasi yang selama ini bersifat komensalisme satu arah dapat ditransformasikan menjadi relasi mutualisme yang menguntungkan kedua belah pihak secara sejajar.

Dengan demikian, hasil penelitian ini menegaskan bahwa relasi komensalisme antara pedagang Tionghoa dan masyarakat lokal di Helvetia berjalan dalam suasana sosial yang damai dan pragmatis, tetapi tetap memelihara ketimpangan ekonomi struktural. Relasi yang stabil ini tidak otomatis menciptakan keadilan sosial apabila tidak disertai redistribusi akses terhadap modal dan peluang usaha. Oleh sebab itu, transformasi relasi ini menjadi bentuk kerja sama yang lebih adil dan partisipatif

menjadi urgensi yang perlu diperjuangkan bersama oleh semua elemen masyarakat lintas etnis di kawasan tersebut.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa hubungan antara pedagang Tionghoa dan masyarakat lokal di Kelurahan Helvetia menunjukkan pola komensalisme sosial-ekonomi. Pedagang Tionghoa memperoleh keuntungan ekonomi yang signifikan melalui dominasi sektor perdagangan, sementara masyarakat lokal dari etnis Batak, Melayu, Jawa, Aceh, Minangkabau, dan Nias tidak merasakan dampak kerugian secara langsung, tetapi juga tidak memperoleh manfaat ekonomi yang setara. Interaksi yang terjadi bersifat fungsional dan damai, namun tetap asimetris, dengan keterlibatan masyarakat lokal yang lebih sering sebagai konsumen atau tenaga kerja informal. Relasi sosial antar etnik berlangsung netral dan saling menghormati, namun belum membentuk kerja sama yang inklusif dalam bidang ekonomi.

Relasi komensalisme ini dapat bertahan dalam jangka pendek karena ditopang oleh kebutuhan timbal balik dan sikap toleransi antar kelompok, namun tidak menjamin terciptanya keadilan sosial dalam jangka panjang. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk mendorong keterlibatan aktif masyarakat lokal dalam aktivitas ekonomi yang lebih produktif, melalui pelatihan usaha, kemudahan akses modal, serta pembentukan kemitraan ekonomi lintas etnis yang saling menguntungkan. Dengan demikian, hubungan antar etnik tidak hanya berlangsung damai secara sosial, tetapi juga adil dan setara dalam dimensi ekonomi.

REFERENSI

- Assingkily, M. S. (2021). *Metode Penelitian Pendidikan: Panduan Menulis Artikel Ilmiah dan Tugas Akhir*. Yogyakarta: K-Media.
- Iqbal, M., Saputri, D., Hasibuan, L. A., Sinaga, L. B., Purba, R. N. B., Hasibuan, S. F., & Lestari, W. (2022). Nasionalisme dan kewarganegaraan dalam perspektif etnis Tionghoa di Kota Medan. *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 10(2), 115–130.
- Koentjaraningrat. (2009). *Manusia dan kebudayaan di Indonesia*. Jakarta: Djambatan.
- Mujani, S. (2017). Pluralisme dan integrasi sosial. *Jurnal Sosiologi Reflektif*, 11(2), 123–138.
- Simamora, V. T. (2022). Perkembangan Ajaran Islam dan Kristen di Kelurahan Tegal Sari Mandala Medan Denai. *Cendekiawan: Jurnal Pendidikan dan Studi Keislaman*, 1(3), 153-156. <https://doi.org/10.61253/cendekiawan.v1i3.73>.
- Soemardjan, S., & Soemardi, S. (2004). *Setangkai bunga sosiologi*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Wijaya, R. (2023). *Dinamika hubungan sosial dan Ekonomi antar etnis di perkotaan*. Bandung: Penerbit ITB.